

PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM BERBASIS KEPENDUDUKAN DI PERDESAAN

Thohir Yuli Kusmanto

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Email: thohiryuli@yahoo.co.id

Abstrak

Nowadays, Islamic economy is growing and developing considerably in Indonesia. It is considered as a better alternative of the earlier economic systems which are traditional (communal) and capitalist economy. These two economic systems did not quite give way to get a prosperous life for Indonesian people. The existing Islamic economics hopefully might answer this problem. So, organizing Islamic economic system as a discourse and praxis must be developed in the community's life. The growth and development of Islamic economic institutions were initially an urban phenomenon. However, lately it has been gone through rural areas. The efforts to develop the role and contribution of Islamic economic institutions in rural areas, can take advantage of the conditions of rural population. Understanding the composition of the population might help to establish economic institutions, to distribute funds and to develop various forms of business.

Ekonomi Islam tumbuh dan berkembang di Indonesia, sebagai alternatif dari sistem ekonomi yang terlebih dahulu ada yaitu ekonomi tradisional (komunal) dan kapitalis. Kedua sistem ekonomi yang ada tidak cukup mampu memberikan jalan menuju kehidupan sejahtera bagi masyarakat Indonesia. Hadirnya ekonomi Islam, tentu harus mampu menjawab persoalan tersebut. Pelembagaan dan pengorganisasian sistem ekonomi Islam baik sebagai wacana dan praksis harus berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi Islam, pada awalnya merupakan fenomena perkotaan. Namun akhir-akhir ini telah merambah pedesaan. Upaya pengembangan peran dan kontribusi lembaga ekonomi Islam di pedesaan, bisa memanfaatkan kondisi kependudukan di pedesaan. Pemahaman komposisi penduduk akan membantu dalam mendirikan lembaga ekonomi, mendistribusikan dana dan mengembangkan berbagai bentuk usaha.

Keywords: Islamic Economics, Institutions, Population, and Rural

A. Pendahuluan

Akhir-akhir ini sistem ekonomi Islam dalam wacana dan praktik telah berkembang luas dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Sebagai wacana ia telah menjadi bagian dari pemberitaan dalam berbagai media, bahan diskusi, seminar, loka karya dan perundang-undangan. Sistem ekonomi Islam tumbuh secara dualistik; berorientasi profit dan non profit. Ekonomi Islam yang berorientasi profit berupa lembaga keuangan syariah, dalam bentuk perbankan syariah, unit usaha syariah, lembaga pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dan lain – lain. Ekonomi Islam non profit berupa; baitul mal, badan amal zakat infaq dan sadaqah (BAZIS), lembaga amal zakat infaq dan sadaqah (LAZIS), dan lembaga wakaf.

Pakar ekonomi memperkirakan ekonomi Islam di Indonesia akan mengalami perkembangan pesat 15 tahun ke depan dan akan menjadi ekonomi syariah terbesar di dunia. Hal tersebut mengingat potensi pasar yang sangat besar, ditambah lagi sektor riil yang terkait ekonomi Islam dapat berjalan lebih baik. Namun demikian *market share* ekonomi Islam baru sekitar dua persen pasar ekonomi konvensional di perbankan, asuransi dan pasar modal.¹

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dan dunia, terutama sektor ekonomi berorientasi profit, dipengaruhi sejarah pertumbuhan bank syariah. Ia muncul pertama kali di Mesir, tidak menggunakan label Islam, untuk mengantisipasi kecurigaan sebagai gerakan fundamentalis. Perintisnya membentuk sebuah bank simpanan yang berbasis *profit sharing* (pembagian laba) di kota Mit Ghamr tahun 1963. Hingga tahun 1967, sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, tetapi dalam bentuk *partnership* dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung.² Pengalaman di Mesir menyebar ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia tahun 1980-an, dengan wacana mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam.³

Di Indonesia sejak Desember 2005, telah beroperasi 3 Bank Umum Syariah dan 19 Unit Usaha Syariah dari Bank Konvensional, yang menyebar ke berbagai wilayah. Data dari Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia

¹ [http://syakirsula.com/index.php?option=com_content&view=article&id=82: potensi-pasar-indonesia-calon-kiblat-ekonomi-syariah&catid=1:berita-syakir-terkini&Itemid=54](http://syakirsula.com/index.php?option=com_content&view=article&id=82:potensi-pasar-indonesia-calon-kiblat-ekonomi-syariah&catid=1:berita-syakir-terkini&Itemid=54) unduh 19 Juni 2013 Rabu, jam 4.17

² [http://syakirsula.com/index.php?option=com_content&view=article&id=95 :sejarah-perkembangan-ekonomi-syariah-1&catid=33:ekonomi-islam&Itemid=75](http://syakirsula.com/index.php?option=com_content&view=article&id=95:sejarah-perkembangan-ekonomi-syariah-1&catid=33:ekonomi-islam&Itemid=75) unduh, 19 juni 2013, rabu jam 4.10

³ ebookbrowse.com/is/islam-sebagai-sistem-ekonomi_lembaga-lembaga_ekonomi_sistem_ekonomiislam_vs_lembaga_ekonomi_sistem_pasar

Desember 2005, menyebutkan total aset dari seluruh bank syariah nasional (belum termasuk BPRS) baru Rp. 20,9 triliun atau 1,42 persen dari seluruh total aset perbankan nasional, dana pihak ketiga yang dihimpun sebesar Rp.15,6 triliun atau kira-kira 1,38 persen dari dana pihak ketiga yang dihimpun seluruh sistem perbankan.⁴

Sistem ekonomi Islam non profit pun berkembang pesat di Indonesia. Sistem ini mengelola; zakat, sadaqah, infak, dan wakaf. Potensinya sangat besar, jika terkoordinasi dengan baik, menurut riset Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Fakultas Ekonomi Manajemen (FEM) IPB tahun 2011 mencapai angka 3,4 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) atau kurang lebih Rp 217 triliun. Khusus potensi zakat dari Giro Wadiah dan Deposito Mudharabah di perbankan syariah, ditemukan bahwa potensi zakat keduanya mencapai masing-masing sebesar Rp 155 miliar dan Rp 739 miliar.⁵

Perkembangan dan pertumbuhan sistem ekonomi Islam bukan hanya sebagai fenomena perkotaan, tetapi juga perdesaan. Bahkan sistem ekonomi Islam non profit ini sesungguhnya, telah lama berkembang di perdesaan, terutama yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Berkembangnya sistem ekonomi Islam di perdesaan berproses secara evolutif, dalam kehidupan masyarakat perdesaan. Dinamika sistem ekonomi Islam di perdesaan baik sebagai wacana maupun praksis, menarik penulis untuk menyusun makalah ini.. Analisis kependudukan menjadi pisau untuk menjelaskan potensi pengembangan ekonomi Islam di perdesaan.

Kajian atas tema ini bisa menjadi isu menarik dalam rangka pengembangan ilmu pengembangan masyarakat Islam. Baik dalam ranah teoretik maupun praktis. Hal ini selaras dengan upaya pengetahuan tentang pengembangan masyarakat Islam yang selama ini masih terus mencari alternatif. Apalagi fakta yang ada dari ilmu pengembangan masyarakat Islam memiliki dimensi yang luas, sehingga mengembangkan multi dimensi yang berifat abstrak maupun praktis perlu dilakukan.

B. Dinamika Sistem Ekonomi di Perdesaan Indonesia

Pengembangan ekonomi Islam di pedesaan tentu buka sesuatu yang baru bagi mayoritas desa yang penduduknya beragama Islam. Nilai-nilai Islam yang telah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa telah menjadi dasar dari praktik-praktik ekonomi. Namun demikian seringkali masyarakat pedesaan kurang menyadari bahwa mereka telah mempraktikkan sistem ekonomi Islam. Dalam konteks kekinian yang merupakan evolusi yang

⁴ *Ibid.* hlm. 6.

⁵ Lihat dalam <http://www.baznas.or.id/ib-peduli/> unduh, Rabu, 26 Juni 2013, jam 16.08.

panjang kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan merupakan sistem ekonomi campuran yang dualistik.

Sistem ekonomi pedesaan di Indonesia dalam konteks kekinian berlangsung dalam pergumulan sistem ekonomi tradisional (prakapitalistik) dengan ekonomi modern (kapitalistik). Sistem ekonomi kapitalistik di pedesaan merupakan bentuk penetrasi perkotaan atas pedesaan. Mentalitas ekonomi kota telah menjungkirbalikan prinsip – prinsip ekonomi produksi masyarakat pedesaan. Selama ini proses produksi ekonomi pedesaan dilakukan untuk swasembada, dengan sedikit kelebihan yang dijual ke pasar. Mentalitas kota telah merubahnya menjadi hukum pertukaran sebagai dasar proses produksi. Petani tumbuh menjadi wiraswasta, memproduksi untuk usaha-usaha perdagangan.⁶

Kapitalisme kota mengikis karakteristik utama masyarakat pedesaan yang sebelumnya bersifat homogen. Kehidupan masyarakat desa yang selama ini, didasari oleh nilai kesederhanaan dan kebersamaan. Semangat kolektivitas dalam berbagai aspek kehidupan berlangsung secara kontinyu, harmoni sosial cenderung lebih mudah tercipta. Persoalan pangan dan deferensiasi sosial akibat tekanan pertumbuhan penduduk, diselesaikan dengan ekspansi statis oleh komunitas sehingga homogenitas akan tetap terjaga (Boeke, 1974). Permukiman dan pertanian baru akan dibuka dalam jumlah yang secukupnya sekedar untuk memenuhi kebutuhan subsistensi, ketika komunitas baru telah penuh populasinya maka pola yang sama akan dilakukan.⁷

Kemajuan teknologi informasi meretas batas – batas isolasi sosial budaya, ekonomi, dan politik pedesaan. Desa menjadi bagian dari kesatuan global. Kualitas kehidupan desa yang terus meningkat baik dalam pemenuhan kebutuhan pokok (pangan, sandang dan papan), pendidikan dan kesehatan telah meningkatkan pula jumlah penduduk pedesaan. Akibatnya, tingkat kepadatan penduduk desa pun tinggi. Lahan – lahan pertanian berubah fungsi menjadi tempat tinggal atau ruang ekonomi dan sosial non pertanian. Perubahan fungsi tersebut menjadikan lahan pertanian semakin sempit. Untuk memenuhi kebutuhannya, maka masyarakat mengembangkan teknologi dan komersialisasi pertanian. Transformasi tersebut berdampak sosial dan ekologi

⁶ Lihat dalam J.H. Boeke, *Pra Kapitalisme di Asia*, terjemahan D. Projosiswoyo (Jakarta : Penerbit Sinar Harapan, 1983), hlm. 9 – 10.

⁷ Darmawan Salman, *Sosiologi Desa : Revolusi Senyap dan Tarian Kompleksitas* (Makasar : Inninawa, 2012), hlm. 52.

sangat luas. Secara sosiologis telah menyebabkan deferensiasi sosial baru di perdesaan.⁸

Ekonomi kapitalistik perkotaan di desa menurut Boeke, belum sepenuhnya menguasai kehidupan perdesaan. Masyarakat desa pada beberapa situasi tertentu masih menjalankan sistem ekonomi dan sosial lama dalam kehidupannya. Perang sistem tersebut masih terus berlangsung. Situasi tersebut diistilahkan Boeke sebagai sistem perekonomian dualistik. akibatnya keselarasan sosial dan kesatuan ekonomi tidak ada. Kedamaian internal yang sejati, hilang dalam kehidupan desa. Keseimbangan ekonomi terganggu dan tanpa dapat dihentikan.⁹

Kemajuan teknologi informasi meretas batas – batas isolasi sosial budaya, ekonomi, dan politik perdesaan. Desa menjadi bagian dari kesatuan global. Kualitas kehidupan desa yang terus meningkat baik dalam pemenuhan kebutuhan pokok (pangan, sandang dan papan), pendidikan dan kesehatan telah meningkatkan pula jumlah penduduk perdesaan. Akibatnya, tingkat kepadatan penduduk desa pun tinggi. Lahan – lahan pertanian berubah fungsi menjadi tempat tinggal atau ruang ekonomi dan sosial non pertanian. Perubahan fungsi tersebut menjadikan lahan pertanian semakin sempit. Untuk memenuhi kebutuhannya, maka masyarakat mengembangkan teknologi dan komersialisasi pertanian. Tranformasi tersebut berdampak sosial dan ekologi sangat luas. Secara sosiologis telah menyebabkan deferensiasi sosial baru di perdesaan.¹⁰

Faktor yang dominan mempengaruhi perubahan di pedesaan menurut Popkin¹¹ (1989) adalah politik dan ekonomi. Dominasi kehidupan politik, sangat terlihat dalam banyaknya kepentingan politik atas desa. Diantaranya perkembangan pemerintahan-pemerintahan yang terpusat yang kuat dan ekspansi pasar nasional dan internasional yang disertai dengan perubahan-perubahan mendasar bentuk-bentuk desa dan hubungan petani dengan elit-elit agraria. Sebagian besar petani saat ini hidup dengan bentuk-bentuk desa yang terbuka, yang bercirikan tanggung jawab individual dalam perpajakan, batas-batas desa yang tidak jelas dengan dunia luarnya, sedikit atau tanpa pembatasan-pembatasan dalam pemilikan tanah. Dalam konteks ini, muncul

⁸ Yusup Napiri Maguantara, *Pembenahan Tata Produksi Pertanian Pangan : Strategi dan Pratik Menuju Kedaulatan Petani*, dalam *Jurnal Analisis Sosial*, Vol. 10 No. 1 Juni 2005, Penerbit Akatiga Bandung, hlm. 36.

⁹ J.J. Boeke, *Op. Cit.* hlm. 11 – 12.

¹⁰ Maguantara, Yusup Napiri, *Pembenahan Tata Produksi Pertanian Pangan : Strategi dan Pratik Menuju Kedaulatan Petani*, dalam *Jurnal Analisis Sosial*, Vol. 10 No. 1 Juni 2005, Penerbit Akatiga Bandung, hlm. 36.

¹¹ Lihat dalam Samuel S. Popkin, *Petani Rasional*, (Jakarta: Yayasan Padamu Negeri, 1986), hlm.1-2.

suatu perkembangan dalam hal ketidakjelasan pengertian-pengertian tentang kewargadesaan (*village citizenship*), dan pemilikan tanah secara pribadi. Faktor dominan dalam aspek perekonomian, terlihat pada relasi petani (penggarap) dengan orang yang memberikan tanah (elit-elit agraria) cenderung berubah bentuk menjadi kontraktual yang tepat dan jelas (dahulu patron-klien) untuk mendapatkan barang-barang dan jasa dari beberapa orang yang berbeda. Perubahan relasi ekonomi ini, sebagai akibat dari adanya ekspos petani secara langsung dengan kekuatan-kekuatan pasar. Dampak yang lebih luas akan membahayakan kesejahteraan petani. Kondisi tersebut sangat bertolak belakang dengan masa lalu. Hubungan ekonomi di masa lalu senantiasa memperhitungkan aspek moral dalam tata kelola ekonomi, sehingga kehidupan petani lebih sejahtera. Pola ini diatur oleh lembaga-lembaga desa. Kondisi di masa lalu tersebut, bisa berlangsung karena semangat kolektivitas masing tinggi

Wacana dan praksis ekonomi Islam memasuki kehidupan masyarakat perdesaan dalam pergulatan sistem ekonomi lama (tradisional komunal) dengan sistem ekonomi baru (modern individual liberal). Perkembangan dan pertumbuhan sistem ekonomi Islam di perdesaan di Indoneisa (khususnya Jawa) sangat signifikan khususnya di perdesaan padi sawah. Kecenderungan ini merupakan sesuatu yang wajar, karena desa dengan sistem pertanian padi sawah selalu mudah menerima perubahan. Apalagi secara sosio-religius masyarakat perdesaan di Jawa mayoritas menganut agama Islam. Secara normatif dan ideologis tentunya mereka akan mudah menerima sistem ini, karena sesuai basis moral atau keyakinan agamanya. Bahkan wacana dan praksis telah dipraktikkan sebagai bagian menerapkan syari'at Islam.

C. Prinsip – Prinsip dan Perkembangan Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam tumbuh dan berkembang di pedesaan, diantara sistem ekonomi kapitalis (perkotaan) yang dominan dan pra kapitalis bagian dari masa lalu desa. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang merujuk pada syari'at sebagai nilai dan norma kehidupan yang datang dari Allah SWT, yang diyakini para penganutnya sebagai suatu sistem yang memiliki kekuatan dan kemampuan memakmurkan dan mensejahterakan para pengamalnya baik muslim maupun non muslim. Berdasarkan pada penjelasan tersebut maka sistem ekonomi Islam bersifat universal bagi semua umat manusia, tidak pandang Islam atau non Islam.¹² Sebagai pengetahuan

¹²Pradja, Juhaya S., *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm.74. Definisi tersebut menunjukkan realitas yang bersifat normatif (wacana), untuk itu perlu upaya

ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari berbagai upaya manusia yang berlandaskan prinsip-prinsip dasar nilai Islam (Al Qur'an dan As Sunah) dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai *falah* (kemuliaan, kesejahteraan).¹³

Dalam pandangan Didin S. Damanhuri (2013) *falah* menunjuk pada kondisi kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan umum, baik secara material maupun spiritual, dan terciptanya kemakmuran serta keadilan sosial. Untuk mewujudkan kondisi tersebut maka harus ada keadilan ekonomi baik makro maupun mikro sebagai basis sederhana (*felt needs*). Terlembagakannya keuangan syariah yang progresif, sebagai bentuk dekonstruksi sistem *bubble economy*, *ersatz/crony capita-lism*. Pengembangan sistem *extended family* sebagai basis pengembangan model negara kesejahteraan yang mementingkan peran nilai dan materi secara seimbang. Kemudian mewujudkan negara dengan berlandaskan pada *tauhid*, *adalah*, dan *kholifatul fil ardh*. Prinsip-prinsip tersebut berlaku pula dalam upaya mewujudkan kehidupan yang baik (*hayatan thoyyiban*).¹⁴

Falah sebagai dasar dan tujuan dari praktik ekonomi Islam berlangsung dalam konteks kehidupan dunia dan akherat. Dalam rangka kepentingan dunia, mencakup aspek kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, dan kekuatan serta kehormatan. Untuk kepentingan akherat mencakup kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, dan kemuliaan abadi. Selain itu konsep *falah* mencakup pula unsur-unsur yang bersifat mikro dan makro, sehingga cakupannya menjadi lebih luas.¹⁵

Konsep ekonomi Islam berbeda secara mendasar dengan konsep kapitalisme dan sosialisme. Ekonomi dalam Islam, selain didasarkan pada komitmen spritual, juga didasarkan atas konsep persaudaraan universal sesama manusia. Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan, menuntut agar semua sumber daya yang menjadi amanat suci Tuhan, digunakan untuk mewujudkan maqashid syari'ah, yakni pemenuhan

mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai sebuah praksis. Dalam praktiknya tentu ekonomi Islam belum tentu sepenuhnya berhasil, walaupun secara prinsipil bagus. Kegagalan dalam praksis, merupakan akibat dari kegagalannya dalam memecahkan berbagai masalah ekonomi masyarakat. Bukan karena kelemahan atau kekurangan dari prinsip-prinsipnya melainkan karena kegagalan para ekonom dalam mentafsir dan mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut. Lihat dalam Munrokhim Misanam, dkk., *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm. 18.

¹³ *Ibid.* hlm. 19.

¹⁴ Lihat dalam Didin S. Damanhuri, *Globalisasi, Sistem Ekonomi dan Model Pembangunan yang Ber"Keadilan Sosial"* (Revitalisasi Maqasid Syariah di Tengah-Tengah Hegemoni Ekonomi Konvensional), di *Dunia dan di Indonesia*, makalah, IE FEM IPB, September 2013.

¹⁵ Munrokhim Minsanam, dkk., *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm. 2.

kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan dasar (primer), seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Persaudaraan dan keadilan juga menuntut agar sumberdaya didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat melalui kebijakan yang adil. Instrumennya berupa; zakat, infaq, sedekah, pajak, kharaj, jizyah, cukai ekspor-impor dan sebagainya.¹⁶

Dalam ekonomi Islam, nilai-nilainya bersumber Alquran dan hadits berupa prinsip-prinsip universal. Di saat sistem ekonomi lain hanya terfokus pada hukum dan sebab akibat dari suatu kegiatan ekonomi, maka Islam lebih jauh membahas nilai-nilai dan etika yang terkandung dalam setiap kegiatan ekonomi tersebut. Mendasarkan nilai-nilai tersebut, kegiatan ekonomi Islam berlangsung. Fondasi utama Ekonomi Islam yaitu tauhid (aqidah), syariah dan akhlak¹⁷.

Titik tolak gerakan ekonomi Islam khususnya lembaga keuangan di Indonesia dimulai tahun 1980-an¹⁸, ditandai adanya upaya untuk membangun proyek ekonomi Islam (termasuk "bank syariah" dan pelarangan bunga¹⁹). Dalam perkembangan awal tersebut, ada perbedaan pandangan antar Ulama Islam dengan latar belakang organisasi kemasyarakatan yang berbeda. Titik temu antar Ulama Islam tersebut baru didapat pada tahun 1990-an. Beberapa Ulama Islam yang berada di dalam organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cedekia-wan Muslim Indonesia (ICMI) menyepakati untuk mendukung pembentukan bank syariah pertama di Indonesia. Dukungan

¹⁶ Agustianto, *Filsafat Ekonomi Islam*, makalah tanpa tahun dan penerbit.

¹⁷ *Ibid.*, hlm.2

¹⁸ Perkembangan ekonomi Islam yang berorientasi profit merupakan bagian dari wacana global di dunia Islam. Dalam konteks ini muncul pertanyaan dari beberapa kalangan apakah pertumbuhan perbankan Islam akibat dari keunggulan komparatif dari paradigma perbankan Islam atau itu terutama disebabkan oleh kebangkitan Islam di seluruh dunia sejak akhir 1960-an? Haruskah bank syariah diatur berbeda dari sistem perbankan konvensional produk dari Barat? lihat dalam Beng Soon Chong dan Ming-Hua Liu, *Islamic banking: Interest-free or interest-based?*, Available online at www.sciencedirect.com Pacific-Basin Finance Journal 17 (2009) 125–144. Sejarah pertumbuhan ekonomi Islam di tandai oleh didirikannya bank syariah. Ia pertama kali muncul di Mesir, tidak menggunakan label Islam, untuk mengantisipasi kecurigaan sebagai gerakan fundamentalis. Perintisnya membentuk sebuah bank simpanan yang berbasis *profit sharing* (pembagian laba) di kota Mit Ghamr tahun 1963. Hingga tahun 1967, sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, tetapi dalam bentuk *partnership* dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung (Syakirsyula, 2013). Titik awal ini, merupakan bagian dari kebangkitan Islam dalam mengembangkan sistem ekonomi dalam wacana dan praksis. Pengalaman dari Mesir menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia.

¹⁹ Pelarangan bunga karena sebagian besar ulama Islam melihatnya sebagai riba. Dalam Al Qur'an riba merupakan larangan dari Allah SWT sebagaimana dalam Surat Ali Imron (3) : 130 : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."

tersebut memiliki pengaruh yang strategis dalam gerakan ekonomi Islam. Bahkan dampak dari dukungan MUI, menjadikannya memiliki peran yang semakin kuat dalam menentukan pertumbuhan industri ekonomi Islam setelah tahun 1998.²⁰ Pada masa ini terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem politik di Indonesia akibat reformasi atas pemerintahan Orde Baru akibat krisis ekonomi. Ruang kebebasan menjadi terbuka lebar, sehingga perkembangan ekonomi Islam semakin terbuka. Apalagi dalam krisis tersebut lembaga keuangan Islam berhasil keluar dari krisis.

Kebijakan dan regulasi sangat penting dan strategis bagi perkembangan kelembagaan ekonomi Islam khususnya pada pengelolaan keuangan. Berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1991,²¹ menjadi tonggak sejarah perbankan Islam di Indonesia. Dasar hukum dari keberadaan BMI adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.²²

Kebijakan dan regulasi terus berkembang, diantaranya berupa fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Sejumlah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) meliputi: Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Beberapa fatwa DSN-MUI tersebut menjadi dasar penyusunan materi dari berbagai Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang juga evolutif. Misalnya PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Kemudian dicabut dengan mengeluarkan PBI baru No.

²⁰ Choiruzzad, Shofwan Al Banna dan Bhakti Eko Nugroho, *Indonesia's Islamic Economy Project and the Islamic Scholars*, Available online at www.sciencedirect.com Procedia Environmental Sciences 17 (2013) p. 957.

²¹ Menurut M. Dawam Raharjo, berdirinya BMI merupakan tahap pertama dari pelembagaan ekonomi keuangan Islam di Indonesia. Tahapan ini merupakan tahap *survival* yang dalam teori ekonomi perusahaan disebut sebagai tahap kritis. Keberhasilannya dalam mengatasi kondisi kritis, akan menentukan apakah perusahaan akan mengalami kebangkrutan atau tetap berlanjut. Tahap ini berlangsung antara tahun 1992-1998. Tahap kedua dari perkembangan lembaga keuangan Islam adalah berdirinya Bank Syariah Mandiri pada tahun 2002. BSM merupakan anak perusahaan dari Bank Mandiri yang merupakan bank konvensional bagian dari badan usaha milik negara (BUMN). Berdirinya BSM diikuti berbagai bank konvensional lainnya, dalam jumlah yang tidak sedikit. Lihat dalam M. Dawam Raharjo, *Menuju Perbankan Sosial Islam Transformatif*, Makalah, Jakarta, Agustus, 2013.

²² Dalam Anshori, Abdul Ghofur, Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional, *La Riba : Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 2, Desember 2008, hlm.161.

9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.²³

D. Analisa Kependudukan untuk Pengembangan Ekonomi Islam di Perdesaan

Wacana dan praktik dari sistem ekonomi Islam tidak bisa melupakan diri dari aspek kependudukan. Kondisi kependudukan menurut pakar dan praktisi ekonomi Islam merupakan salah indikator untuk memproyeksikan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Berdasarkan data kependudukan hasil sensus tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia 87% beragama Islam. Jumlah penduduk tersebut merupakan potensi pasar yang besar. Namun perkembangan terkini, terlihat bahwa capaian perbankan syariah baru sekitar 2,3 persen dalam menggarap potensi pasar tersebut.

Analisa kependudukan untuk pengembangan ekonomi Islam tidak semata-mata mengacu pada jumlah kumulatif penduduk yang menganut agama Islam di Indonesia. Jumlah penduduk beragama Islam umur produktif bisa menjadi instrumen lain. Penduduk pada usia ini menentukan dinamika ekonomi masyarakatnya. Jumlahnya yang besar merupakan potensi pasar yang menentukan pengembangan sistem ekonomi Islam.

Jumlah penduduk yang menganut agama Islam dan tingkatan usianya di Indonesia, pada sensus penduduk 2010 sebagai berikut;

Tabel 1. Penduduk Indonesia Berdasarkan Agama yang Dianut Tahun 2010²⁴

Kelompok Umur	Agama Satuan: jiwa									
	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Khong Hu Chu	Lainnya	Tidak Terjawab	Tidak Ditanyakan	Jumlah
0-4	19 701 622	1 730 941	731 201	340 030	117 323	7 349	33 818	5 924	10 494	22 678 702
5-9	20 076 013	1 830 056	788 072	364 129	132 162	8 000	36 687	3 639	14 722	23 253 480
10-14	19 570 144	1 716 328	738 669	351 300	129 950	7 939	29 180	11 431	116 140	22 671 081
15-19	18 047 190	1 490 013	614 571	302 277	135 442	8 402	24 663	14 291	243 885	20 880 734
20-24	17 356 491	1 368 715	545 779	275 403	143 362	8 970	23 152	18 234	151 527	19 891 633
25-29	18 751 271	1 405 502	552 770	316 382	153 338	9 375	23 360	15 286	83 159	21 310 443
30-34	17 394 118	1 356 633	531 404	331 215	131 651	7 563	20 664	13 116	44 321	19 830 685

²³ *Ibid.*, hlm.163.

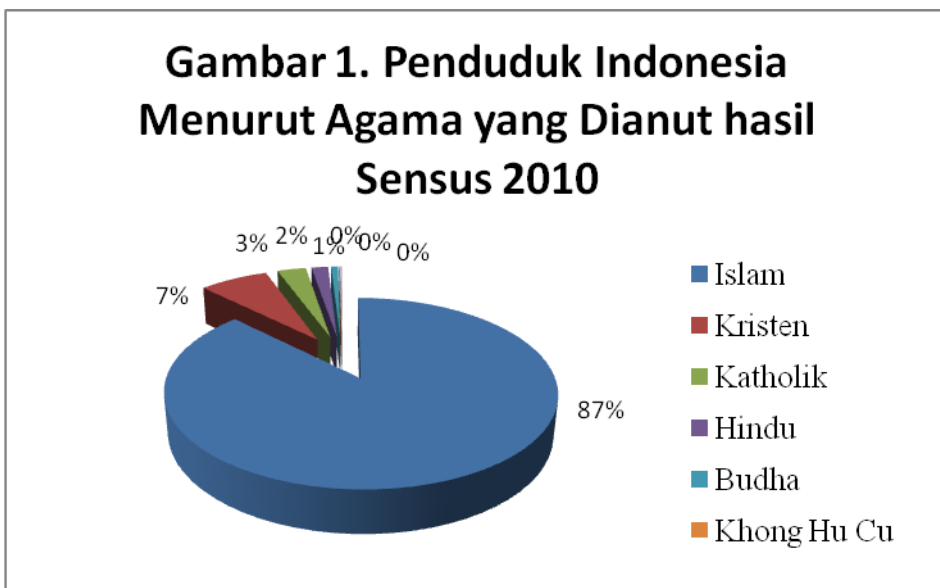
²⁴ Lihat dalam <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?wid=3300000000&tid=321&fi1=57&fi2=3> unduh, 25 Juni 2013 jam 08.15

Kelompok Umur	Agama Satuan: jiwa									Jumlah
	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Khong Hu Chu	Lainnya	Tidak Terjawab	Tidak Ditanyakan	
35-39	16 216 251	1 254 291	494 365	356 120	115 180	6 568	19 530	11 786	31 040	18 505 131
40-44	14 501 505	1 096 115	448 778	310 958	109 682	6 728	18 042	10 308	22 736	16 524 852
45-49	12 333 954	906 890	382 055	258 209	112 479	7 889	16 258	8 571	14 677	14 040 982
50-54	10 128 813	741 151	320 824	214 235	114 915	9 161	14 557	7 463	10 202	11 561 321
55-59	7 351 878	550 988	246 793	168 424	100 220	8 620	10 690	5 640	5 317	8 448 570
60-64	5 249 024	388 405	185 779	136 828	74 438	6 741	9 709	4 483	3 354	6 058 761
65-69	4 098 516	277 214	134 964	112 302	53 429	4 709	7 303	3 609	1 985	4 694 031
70-74	3 037 243	197 096	90 945	79 280	38 114	3 972	5 626	2 549	1 506	3 456 331
75-79	1 729 706	115 960	52 701	48 752	22 741	2 591	3 151	1 575	728	1 977 905
80-84	1 006 474	63 192	29 007	28 066	11 745	1 503	1 848	811	524	1 143 170
85-89	380 819	26 189	12 410	11 440	4 941	702	787	366	307	437 961
90-94	150 870	8 611	4 439	4 414	1 617	226	352	145	225	170 899
95+	94 260	4 223	2 347	2 352	525	83	240	355	269	104 654
Jumlah	207 176 162	16 528 513	6 907 873	4 012 116	1 703 254	117 091	299 617	139 582	757 118	237 641 326

Sumber data : sensus penduduk Indonesia tahun 2010

Dalam tabel 1 terlihat bahwa mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam; 207.176.162 jiwa, kemudian Kristen; 16.528.513, Katolik; 6.907.873, Hindu; 4.012.116, Budha; 1.703.254, Kong Hu Cu; 117.091, lainnya; 299 617, Tidak Terjawab ; 139.582, Tidak Ditanyakan ; 757 118. Penduduk usia produktif (usia 15 – 64 tahun) yang menganut agama Islam di Indonesia jumlahnya; 137.220.495 jiwa atau 66,23 % dari total penduduk Indonesia yang menganut agama Islam. Jumlah tersebut merupakan pasar potensial untuk pengembangan ekonomi Islam, karena pada usia produktif proses ekonomi seseorang berlangsung baik produksi, distribusi maupun konsumsi. Penduduk usia produktif penentu dinamika ekonomi masyarakat.

Gambaran yang bersifat komparatif dan lebih jelas dalam bentuk persentase dapat dibaca dalam bentuk grafik sebagai berikut;



Berdasarkan grafik di atas penduduk penganut agama Islam di Indonesia persentasenya paling tinggi dibandingkan dengan agama lain. Islam ; 87 %, Kristen; 7 % , Katolik; 3 %, Hindu; 2 %, Budha; 1 %, yang lain – lain 0 %. Besarnya jumlah penduduk penganut Islam tersebut merupakan potensi yang luar biasa. Namun belum memahami dan menggunakan sistem ekonomi Islam dalam kehidupannya.

Analisa kependudukan bisa juga dilakukan berdasarkan komposisi jumlah penduduk perdesaan berdasarkan agama yang di anutnya. Berikut ini data tentang penduduk perdesaan berdasarkan agama yang dianutnya.

Tabel 2. Penduduk Perdesaan di Indonesia Berdasarkan Agama yang Dianut²⁵

Kelompok Umur	Agama Satuan: jiwa									Jumlah
	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Khong Hu Chu	Lainnya	Tidak Terjawab	Tidak Ditanyakan	
0-4	9 797 401	1 097 707	531 983	167 853	17 036	2 099	32 424	2 239	4 900	11 653 642
5-9	10 236 188	1 179 153	576 957	181 567	19 214	2 317	35 121	1 690	5 178	12 237 385
10-14	10 222 178	1 095 547	533 800	178 710	19 392	2 268	27 568	4 633	44 818	12 128 914
15-19	8 625 678	835 614	390 871	139 605	17 599	2 177	22 746	4 488	86 370	10 125 148
20-24	7 782 053	677 862	322 530	121 737	15 062	2 103	21 496	4 163	40 816	8 987 822

²⁵ *Ibid.*

Kelompok Umur	Agama Satuan: jiwa									
	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Khong Hu Chu	Lainnya	Tidak Terjawab	Tidak Ditanyakan	Jumlah
25-29	8 564 860	740 994	340 983	148 930	15 495	2 171	21 787	4 332	23 389	9 862 941
30-34	8 081 760	738 305	328 763	156 747	13 741	1 813	19 237	3 882	10 328	9 354 576
35-39	7 789 315	682 403	303 632	169 247	12 784	1 512	17 871	3 763	6 780	8 987 307
40-44	7 079 286	588 465	271 683	145 649	12 686	1 590	16 467	3 639	4 709	8 124 174
45-49	6 223 017	484 331	231 984	129 362	13 036	1 881	14 900	3 148	2 808	7 104 467
50-54	5 231 796	393 193	192 291	111 749	12 473	2 156	13 228	2 903	1 862	5 961 651
55-59	3 890 557	291 258	142 737	88 083	10 267	1 875	9 651	2 297	1 005	4 437 730
60-64	2 971 927	211 922	112 913	76 340	8 083	1 457	8 965	2 017	733	3 394 357
65-69	2 345 176	154 343	84 694	63 317	6 244	919	6 750	1 764	454	2 663 661
70-74	1 793 863	110 418	57 964	46 564	4 485	802	5 221	1 217	389	2 020 923
75-79	1 025 704	67 073	34 035	28 152	2 736	486	2 874	661	209	1 161 930
80-84	606 531	37 367	18 734	16 942	1 507	309	1 681	388	142	683 601
85-89	228 456	15 581	7 933	6 722	639	129	704	174	52	260 390
90-94	92 500	5 383	3 058	2 790	218	42	327	72	20	104 410
95+	59 348	2 916	1 836	1 542	82	13	223	67	14	66 041
Jumlah	102 647 594	9 409 835	4 489 381	1 981 608	202 779	28 119	279 241	47 537	234 976	119 321 070

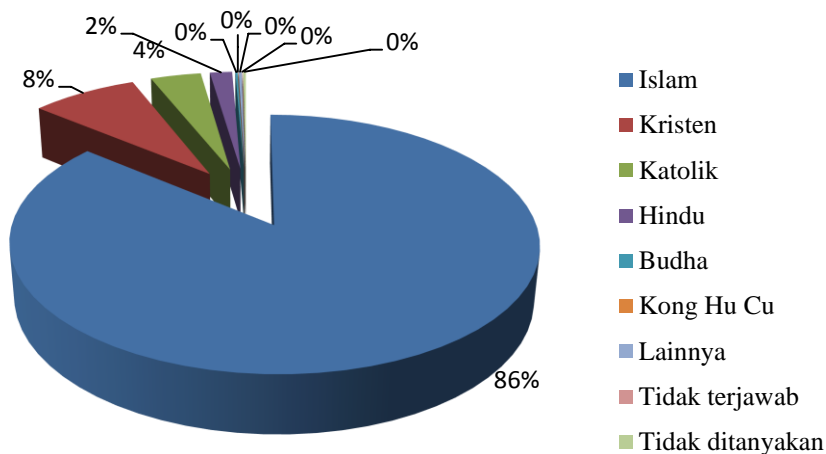
Sumber data : sensus penduduk Indonesia tahun 2010

Data tabel di atas bisa dibaca bahwa jumlah penduduk Indonesia di perdesaan yang menganut agama Islam merupakan mayoritas yaitu; 102.647.594 jiwa, Kristen; 9.409.835 jiwa, Katolik; 4.489.381 jiwa, Hindu; 1.981.608 jiwa, Budha ; 202.779 jiwa, Khon Hu Cu ; 28.119, lainnya; 279.241 jiwa, Tidak Terjawab ; 47 537, Tidak ditanyakan ; 234 976. Gambaran data tersebut menunjukkan potensi pasar untuk pengembangan ekonomi Islam di perdesaan sangat besar.

Potensi pasar ekonomi Islam di perdesaan bisa dijelaskan mengacu pada jumlah penduduk penganut agama Islam usia produktif. Tabel di atas menunjukkan jumlah penduduk muslim perdesaan usia produktif (15 – 64 tahun) sebanyak ; 66.241.249 jiwa atau 64,45 % dari total penduduk perdesaan beragama Islam. Penduduk usia produktif sangat menentukan dinamika ekonomi masyarakat, karena perannya dalam produksi dan distribusi pendapatannya.

Komparasi komposisi penduduk berdasarkan agama yang dianut pada masyarakat perdesaan dapat dibaca dalam gambar berikut:

Gambar 2. Penduduk Indonesia di Perdesaan Berdasarkan Agama yang Dianut



Dalam gambar di atas penduduk perdesaan di Indonesia yang menganut agama Islam. 86 %, kemudian agama Kristen; 8 %, agama Katolik; 4 %, Hindu ; 2 %, yang lain-lainnya; 0%. Berarti mayoritas penduduk perdesaan di Indonesia beragama Islam.

E. Simpulan

Hadirnya sistem ekonomi Islam di perdesaan akan mampu menjadi alternatif dalam memperbaiki kehidupan masyarakat perdesaan yang mayoritas berada dalam jerat kemiskinan. Kemampuan tersebut mengacu pada prinsip dan praktik ekonomi Islam yang mengedepankan keseimbangan kebutuhan individual dan kelompok untuk mencapai kesejahteraan (*falah*). Upaya ini sangat relevan dengan watak usaha ekonomi perdesaan yang lebih bersifat usaha kecil, mikro dan menengah. Sedangkan ekonomi Islam lebih perhatian pada jenis usaha tersebut. Pengembangan sistem ekonomi Islam di perdesaan Indonesia diproyeksikan memiliki prospek yang cerah. Analisis kependudukan menunjukkan bahwa mayoritas penduduk menganut agama Islam pada tingkat nasional yaitu 87 %. Dari jumlah tersebut, mayoritas penduduk penganut agama Islam yang tinggal di perdesaan yaitu; 66.241.249 jiwa atau 64,45 %. Merujuk pada jumlah tersebut maka dapat dimanfaatkan

untuk mengembangkan potensi ekonomi perdesaan dengan pendekatan sisten ekonomi Islam. Namun potensi tersebut belum semuanya tergarap secara optimal. Faktor pemahaman menjadi persoalan utama. Untuk itu perlu sosialisasi terus menerus, dengan memanfaatkan berbagai instrumen keislaman, dan media massa dalam berbagai bentuk. Juga pembuktian kapasitas sistem ekonomi Islam dalam menjamin stabilitas dan kesejahteraan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, *Filsafat Ekonomi Islam*, makalah tanpa tahun dan penerbit.
- Anshori, Abdul Ghofur, Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional, *La Riba : Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 2, Desember 2008.
- Boeke, J.H., *Pra Kapitalisme di Asia*, terjemahan D. Projosiswoyo (Jakarta : Penerbit Sinar Harapan, 1983).
- Chaudhry, Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar*, terjemahan Suherman Rosyidi, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Choiruzzad, Shofwan Al Banna dan Bhakti Eko Nugroho, *Indonesia's Islamic Economy Project and the Islamic Scholars*, Available online at www.sciencedirect.com Procedia Environmental Sciences 17 (2013) 957 – 966
- Chong, Beng Soon dan Ming-Hua Liu, *Islamic banking: Interest-free or interest-based?*, Available online at www.sciencedirect.com Pacific-Basin Finance Journal 17 (2009) 125–144.
- Damanhuri, Didin S., *Globalisasi, Sistem Ekonomi dan Model Pembangunan yang Ber"Keadilan Sosial" (Revitalisasi Maqasid Syariah di Tengah-Tengah Hegemoni Ekonomi Konvensional)*, di Dunia dan di Indonesia, makalah, IE FEM IPB, September 2013.
- Hayami, Yujiro dan Masao Kikuchi, *Dilema Ekonomi Desa : Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia*, terjemahan Zahara D. Noer, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1987).
- <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?wid=3300000000&tid=321&fi1=57&fi2=3> unduh, 25 Juni 2013 jam 08.15
- http://syakirsula.com/index.php?option=com_content&view=article&id=82:potensi-pasar-indonesia-calon-kiblat-ekonomi-syariah&catid=1 :berita-syakir-terkini&Itemid=54 unduh 19 Juni 2013 Rabu, jam 4.17
- http://syakirsula.com/index.php?option=com_content&view=article&id=95:sejarah-perkembangan-ekonomi-syariah-1&catid=33:ekonomi-islam&Itemid=75 unduh, 19 juni 2013, rabu jam 4.10
- <http://www.baznas.or.id/ib-peduli/> unduh, Rabu, 26 Juni 2013, jam 16.08.

- Lembaga-Lembaga Ekonomi Sistem Ekonomi Islam Vs Lembaga Ekonomi Sistem Pasar, lihat dalam *ebookbrowse.com/is/islam-sebagai-sistem-ekonomi*, unduh Senin, 24 Desember 2012.
- Maguantara, Yusup Napiri, Pembenahan Tata Produksi Pertanian Pangan : Strategi dan Pratik Menuju Kedaulatan Petani, dalam *Jurnal Analisis Sosial*, Vol. 10 No. 1 Juni 2005, Penerbit Akatiga Bandung.
- Munrokhim Minsanam, dkk., *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013).
- Popkin, Samuel S., *Petani Rasional*, (Jakarta: Yayasan Padamu Negeri, 1986).
- Pradja, Juhaya S., *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012).
- Raharjo, M. Dawam, *Menuju Perbankan Sosial Islam Transformatif*, Makalah, Jakarta, Agustus, 2013.
- Salman, Darmawan, *Sosiologi Desa : Revolusi Senyap dan Tarian Kompleksitas* (Makasar : Innawa, 2012).